

**KAJIAN KELEMBAGAAN DINAS/SUBDINAS
PETERNAK DI JAWA BARAT BAGIAN TIMUR**

Oleh:

Achmad Firman, SPt., MSi

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JANUARI 2007**

LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian Mandiri

-
1. a. Judul Penelitian :
“Kajian Kelembagaan Dinas/Subdinas Peternak di Jawa Barat Bagian Timur”
b. Bidang Ilmu : Pertanian/Ekonomi Peternakan
-
2. Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar : Achmad Firman, SPt., MSi
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. Gol/Pangkat/NIP : IIIb/Penata TK I/132 297 365
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Jabatan Struktural : -
f. Fakultas/Jurusan : Peternakan/Sosial Ekonomi Peternakan
g. Pusat Penelitian : Universitas Padjadjaran
-
3. Lokasi Penelitian : Indonesia
-
4. Kerjasama dengan institusi lain : Tidak ada
-
5. Sumber Dana : -
-

Bandung, Januari 2007

Mengetahui
Kepala Laboratorium Ekonomi

Peneliti

Ir. Sri Rahayu, MS
NIP: 130 703 522

Achmad Firman, SPt., MSi
NIP: 132 297 365

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahirobbi yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga paper ini yang berjudul “Kajian Kelembagaan Dinas/Subdinas Peternak di Jawa Barat Bagian Timur” dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan rasa terima kasih disampaikan kepada Kepala Laboratorium Ekonomi Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Peternakan yang telah memberikan keleluasaan bagi penulis untuk berkarya.

Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Penulis,

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma manajemen pembangunan pertanian telah berubah, yaitu dari sebelumnya menempatkan pemerintah sebagai pelaku menjadi fasilitator, akselerator, dan regulator. Dengan paradigma baru ini program-program pembangunan pertanian lebih diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat atau dengan kata lain peran pemerintah adalah menyiapkan suatu kondisi yang memungkinkan berkembangnya proses kreatif di masyarakat.

Paradigma baru tersebut diciptakan untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan. Otonomi Daerah, telah menempatkan kabupaten/kota sebagai pelaksana pembangunan, dan propinsi sebagai pelaksana pembangunan yang bersifat lintas kabupaten/kota atau kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam hal penyusunan, pengawasan, penentuan kriteria, standar dan norma, prosedur dan bimbingan, serta evaluasi pada aspek teknis fungsional.

Dalam rangka mengimplementasikan program tersebut, telah terjadi perubahan paradigma dimana sebelumnya peran pemerintah sebagai pelaku, telah berubah sebagai fasilitator, regulator, dan pemberian bimbingan teknis, sedangkan pelakunya adalah swasta dan masyarakat. Paradigma baru tersebut diciptakan untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang otonomi daerah. Otonomi Daerah, telah menempatkan kabupaten/kota sebagai pelaksana pembangunan, dan propinsi sebagai pelaksana pembangunan yang bersifat lintas kabupaten/kota atau kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

Penyusunan instansi dinas di Kabupaten/Kota sangat tergantung dari wacana yang terjadi di daerah. Salah satu kriteria penyusunan nomenklatur dinas adalah berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang menjadi unggulan daerah. Salah satu nomenklatur dinas yang terdapat di Kabupaten/Kota adalah Dinas Peternakan. Akan tetapi, nama dinas tersebut tidak sama di setiap daerah tergantung dari potensinya masing-masing. Ada juga yang menempatkan sektor peternakan hanya sebagai Subdinas atau Kantor Dinas atau setarap dengan seksi. Perbedaan istilah nomenklatur inilah yang akan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program-program pembangunan peternakan karena di tingkat pusat nomenklature Direktorat Jenderal Peternakan menjadi nomenklature tersendiri di bawah Kementerian Pertanian akan tetapi di setiap daerah terdapat perbedaan.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengkaji potensi kelembagaan instansi yang bergerak di sektor peternakan di wilayah Propinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kelembagaan instansi yang bergerak di sektor peternakan khususnya di wilayah Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis;
2. Mempelajari karakteristik, permasalahan dan kendala pengembangan kelembagaan instansi yang bergerak di sektor peternakan pada setiap wilayah kajian;

1.3 Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Database instansi yang bergerak di sektor peternakan di Jawa Barat Bagian Timur
2. Profil instansi yang bergerak di sektor peternakan di Jawa Barat Bagian Timur

1.4 Ruang Lingkup

Wilayah kajian :

Wilayah kajian meliputi 13 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum kebijakan pembangunan peternakan, lebih menitik beratkan pada aspek-aspek yang terkait dengan produksi dan faktor produksi, pengembangan usaha, sumberdaya (alam, teknologi, modal, dan manusia), serta pengembangan sentra komoditas (Departemen Pertanian, 2001). Tujuan pembangunan peternakan sendiri adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak, terpenuhinya konsumsi pangan asal ternak, bahan baku industri, dan ekspor, tersedianya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatnya peranan keseimbangan kelembagaan kerja dan kesempatan berusaha, serta tercapainya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam.

Upaya penjabaran sasaran-sasaran tersebut telah dirumuskan dalam paket kebijakan fungsional produksi peternakan yang mencakup (1) pengembangan produksi dengan faktor produksi yang terdiri atas peningkatan populasi, peningkatan produktivitas dan mutu produksi; serta (2) pengembangan usaha dan kelembagaan yang mencakup usaha, kelembagaan, pengembangan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

2.1. Pendekatan Pembangunan Peternakan

Pembangunan perekonomian di satu negara tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan (*sustainability*) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya.

Dalam perencanaan pembangunan, sering terjadi dilema antara dua pilihan apakah lebih memprioritaskan pembangunan sektoral atau pembangunan wilayah. Iwan Jaya Aziz (1994) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan mengikuti suatu hirarki. Hirarki pertama menunjukkan tujuan pembangunan, hirarki kedua menunjukkan sektor-sektor mana yang terpilih, hirarki ketiga menunjukkan daerah-daerah terpilih, dan hirarki keempat menunjukkan kebijakan siasat dan langkah-langkah apa yang perlu diambil.

Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Jadi, hirarki ke dua dan ke tiga bertukar tempat. Di dalam kenyataan, pendekatan regional sering diambil tidak dalam kerangka totalitas, melainkan hanya untuk beberapa daerah tertentu, seperti daerah terbelakang, daerah perbatasan, atau daerah yang diharapkan mempunyai posisi strategis dalam arti ekonomi-politis. Karena arah yang dituju adalah gabungan antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang dapat diempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berbagai kondisi di atas memberikan gambaran bahwa betapa sulit merencanakan pembangunan karena kompleksnya berbagai permasalahan. Di tambah pula dengan tidak tersedianya data yang akurat dalam merencanakan pembangunan. Demikian pula dengan subsektor peternakan, di mana subsektor ini merupakan sektor yang memberikan kontribusi dalam peningkatan protein hewani. Sudah barang tentu, perencanaan program pembangunan peternakan ditunjukkan untuk meningkatkan produksinya sehingga permintaan akan produk peternakan akan dapat dipenuhi. Namun, permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Wilayah-wilayah mana yang menjadi prioritas untuk pembangunan peternakan
2. Di samping itu, komoditas apa yang menjadi unggulan untuk ditingkatkan produksinya sehingga mampu memenuhi permintaan
3. Pelaku bisnis mana yang lebih menggarap subsektor peternakan di suatu wilayah
4. Kendala prasarana dan sarana apa yang menjadi faktor penghambat pembangunan peternakan di suatu wilayah

Pertanyaan-pertanyaan di atas sebenarnya banyak sekali yang dapat diungkapkan, namun inti dari pertanyaan di atas adalah bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijadikan modal dasar untuk merencanakan pembangunan di sektor peternakan.

Manajemen Pemerintahan

Seringkali, istilah manajemen lebih cenderung pada bagaimana mengelola suatu usaha. Padahal, istilah manajemen mengandung arti lebih daripada hal itu. Manajemen banyak digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan pemerintahan. Manajemen suatu proses yang klas, terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber-sumber lainnya (Goerge R. Terry, 1972). Empat komponen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengendalian (evaluasi) merupakan hal yang terpenting dalam manajemen. Demikian pula dalam pengelolaan pemerintahan, minimal keempat komponen tersebut minimal dijalankan oleh pemerintah.

Di era reformasi ini, pemerintahan menghadapi tantangan yang luar biasa karena sepak terjang pemerintah terus dimonitor oleh masyarakat dan masyarakat dapat melakukan kontrol sosial bagi kebijakan pemerintah bila dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam manajemen pemerintahan dikenal dengan istilah "Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)".

Menurut Herman Haeruman (2000) bahwa secara umum, tata pemerintahan (*governance*) mempunyai 3 “kaki”, yaitu ekonomi, politik, dan administratif. *Economic governance* mencakup proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara dan hubungannya dengan negara lain. Suatu hal yang jelas mempunyai implikasi yang besar pada aspek keadilan sosial, kemiskinan, dan kualitas hidup. *Political governance* adalah proses pengambilan keputusan untuk memformulasikan kebijakan. *Administrative governance* adalah sistem implementasi kebijakan. Diarahkan oleh ketiganya, tata pemerintahan yang baik akan menentukan berbagai proses dan struktur yang memandu berbagai hubungan politik dan sosial ekonomi.

Tata pemerintahan yang baik ini juga bergantung pada kemampuan para pengelola pemerintahan menjalankan kekuasaan, mampu membuat kebijakan yang baik dari waktu ke waktu yang mampu melintas berbagai spektrum ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan bidang-bidang lainnya demi kepentingan masyarakat.

Dari penjabaran di atas, persoalan tata pemerintahan yang baik dapat lebih jauh lagi dipandang sebagai “sebuah bangunan dengan 3 tiang”. Ketiga tiang penyangga itu adalah akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Artinya, setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari penerimaan, pengalokasian, pengamanan, dan pengembangannya. Itu semua karena pejabat publik menjalankan kekuasaan yang dititipkan kepadanya harus melalui berbagai peraturan yang mereka implementasikan, sumberdaya yang mereka kontrol, dan organisasi yang mereka kelola.

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung gugat, kepada siapa, dan apa yang dipertanggung gugatkan. Karenanya, akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut.

Berbeda dengan akuntabilitas dalam sektor swasta yang bersifat *dual-accountability structure* (kepada pemegang saham dan konsumen), akuntabilitas pada sektor publik bersifat *multiple-accountability structure*. Ia dimintai pertanggungjawaban oleh lebih banyak pihak yang mewakili pluralisme masyarakat. Rincinya, kinerja suatu instansi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap atasan, anggota DPRD, organisasi non pemerintah, lembaga donor, tokoh masyarakat, dan komponen

masyarakat lainnya. Semua itu berarti pula, akuntabilitas internal (administratif) dan eksternal ini menjadi sama pentingnya. Akhirnya, akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundangan-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten, dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan rakyatnya, maupun bagi dunia internasional. Akuntabilitas ini sekaligus dapat menjadi indikator penting yang dipertimbangkan oleh banyak unsur masyarakat sipil dan sektor swasta sebelum mereka mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam lingkungan publik.

2. Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.

Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebaran berbagai informasi penting yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh berbagai komponen masyarakat tanpa terkecuali untuk turut mengambil keputusan. Bahkan transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik karena masyarakat luas mengetahui pula duduk persoalannya. Oleh karenanya, informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik.

3. Partisipasi

Komponen partisipasi ditarik dari diterimanya prinsip bahwa masyarakatlah inti dari pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (*beneficiaries*) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang menduduki porsi penting. Karena pembangunan berprinsip dari-dan-untuk rakyat, merekalah yang harus memiliki akses pada institusi-institusi yang mempromosikan pembangunan. Partisipasi ini sekaligus menjadi pokok dari konsep tata pemerintahan yang baik karena berkaitan dengan kualitas hubungan antara pemerintah dengan warga yang dilayani dan dilindunginya.

Hubungan yang pertama mewujudkan lewat proses suatu pemerintahan dipilih. Pemilihan anggota legislatif dan pimpinan eksekutif yang bebas dan jujur merupakan kondisi awal yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemerintah—yang diberi mandat untuk menjadi “dirigen” tata pemerintahan ini—dengan masyarakat (yang diwakili legislatif) dapat berlangsung dengan baik. Pola hubungan yang kedua adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran tiga *domain* pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam proses ini amat penting untuk

memastikan bahwa proses “pembangunan” tersebut dapat memberikan manfaat yang terbesar bagi masyarakat atau (mengutip Amartya Sen) untuk menciptakan “kebebasan”, misalnya dalam hal pengurangan kemiskinan, penciptaan tenaga kerja, perlindungan lingkungan hidup, dan kemajuan kaum perempuan.

Partisipasi, baik yang disalurkan melalui berbagai representasinya (LSM, partai politik, ormas, dan sebagainya) maupun individu (misalnya melalui surat pembaca ke media massa, ikut Pemilu, dan sebagainya) kerap dihubungkan dengan akuntabilitas. Dalam tradisi demokrasi perwakilan yang kita jalankan, rakyat terlibat dalam pemerintahan melalui proses pemilihan umum, maka wajar bila para pejabat publik karenanya jelas harus bertanggung-jawab kepada elektoratnya. Dan di tingkat akar rumput, partisipasi mengindikasikan bahwa struktur pemerintahan cukup luwes untuk menawari masyarakat kesempatan untuk memperbaiki desain dan pelaksanaan program yang ditujukan kepada publik. Di tingkatan berbeda, efektivitas suatu kebijakan dalam pembangunan mensyaratkan adanya dukungan yang luas dan kerja sama dari semua pelaku yang terlibat dan memiliki kepentingan atasnya.

2.2. Arah Pembangunan Kelembagaan Peternakan di Jawa Barat

Penegembangan kelembagaan peternak ditunjukkan untuk kemandirian dan ketangguhan kelompok peternak sebagai subjek pembangunan dan mampu mengangkat perekonomian rakyat. Pada umumnya, usaha yang dilakukan oleh kelembagaan peternak bersumber pada keterampilan yang dimiliki kelompok, modal sendiri dan seadanya. Sehingga dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan peternak diharapkan terjadi keterpaduan usaha mulai dari penanganan budidaya sampai pada pemasaran hasilnya. Oleh karena itu, upaya yang dapat ditempuh untuk pemberdayaan kelembagaan peternak tersebut dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong dan membimbing para peternak yang semula berusaha sendiri (usaha rumah tangga) agar mampu bekerjasama dibidang ekonomi secara berkelompok. Usaha tetap dijalankan di masing-masing keluarga, sedangkan aspek yang dikerjasamakan dalam kelompok seperti pengadaan sarana produksi, penjualan hasil produksi, dan upaya mendapatkan pendanaan dapat diusahakan dalam kelompok. Anggota kelompok terdiri dari para peternak yang saling mempercayai, saling kenal satu sama lain, dan mempunyai kepentingan bersama sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi.
2. Menumbuhkan gabungan kelompok yang usahanya sejenis atau sering juga disebut sebagai asosiasi, misalnya peternak ayam, domba, kambing, dan sebagainya. Tujuan dari ditumbuhkannya gabungan kelompok ini adalah untuk mengembangkan sistem dan usaha agribisnis, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya.

Arah dari pengembangan kelembagaan peternak adalah untuk membentuk kerjasama ekonomi dari berbagai pelaku agribisnis khususnya kelembagaan peternak. Terbentuknya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan usaha dan dapat menghasilkan nilai tambah pendapatan bagi peternak.

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa kelembagaan peternak masih bersifat tradisional. Mereka tidak pernah memperhatikan sistem administrasi, walaupun ada tidak pernah di update. Begitu pula dengan sistem pertemuan yang dibangun. Biasanya pertemuan yang mereka lakukan tidak pernah rutin dilakukan, mereka lebih sering berdiskusi saat bekerja untuk memperoleh informasi dari peternak lainnya.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) telah ditempuh melalui peningkatan Perilaku – Sikap – Keterampilan (PSK). Pada sektor peternakan, misalnya pelatihan penyuluhan, dan pembuatan ~~dan~~plot melalui pendekatan kelembagaan/kelompok. Salah satu kendala yang dihadapi dalam rangka efektivitas program/kegiatan pengembangan SDM peternakan adalah terbatasnya informasi kelembagaan kelompok peternak terutama di tingkat peternak. Informasi kelembagaan tersebut antara lain :

- Belum jelasnya jumlah kelompok peternak yang eksis di lapangan baik berdasarkan tingkatan kelompok (pemula, lanjut, madya, utama) maupun klasifikasi peternak berdasarkan tipologi usahanya (sambilan, cabang usaha, usaha pokok, industri).
- Belum terdatanya kelompok yang kegiatannya mendukung budidaya ternak di lapangan (kelompok usaha jasa aslin, kelompok pengolah hasil peternakan dan sebagainya).
- Belum terdatanya pelaku usaha peternakan berskala industri, yang dilakukan swasta maupun pemerintah (BUMN) khususnya terkait dengan penggunaan tenaga kerja.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, maka terdapat penambahan fungsi, personil dan asset untuk pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota. Hal ini memberi kewenangan dan kesempatan yang lebih untuk kabupaten/kota dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam melaksanakan pembangunan daerah, termasuk pemantauan/monitoring kegiatan pembangunan. Demikian pula hanya di bidang peternakan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menjalankan fungsi pemantauan/ monitoring, antara lain melalui *up-dating* informasi kondisi peternakan terkini (*existing condition*), termasuk informasi kelembagaan kelompok peternak.

Informasi kelembagaan kelompok peternak yang komprehensif, valid dan *uptodate* diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, baik bagi pemerintah maupun stakeholder lainnya yang terkait. Untuk itu perlu adanya kegiatan penyusunan database kelembagaan yang dibentuk dalam suatu sistem informasi kelembagaan kelompok peternak yang dapat diakses setiap saat oleh berbagai pihak yang memerlukan.

BAB 3 METODOLOGI

3.1. Lokasi dan Waktu

Kegiatan ini dilakukan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar, dan Kabupaten Ciamis. Lama kegiatan adalah 5 (lima) bulan.

3.2. Sampel Frame

Sampel/unit analisis instansi yang menangani sektor peternakan di Kabupaten/Kota.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan staf dari Dinas/Subdinas/Seksi/Kantor Peternakan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan pedoman/ kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari laporan/publikasi Dinas Peternakan Kab/Kota, laporan lembaga/kelompok peternak, serta literatur lainnya yang terkait.

BAB 4

PEMBAHASAN

Jawa Barat dalam visinya menyatakan sebagai propinsi yang termaju dan sebagai mitra ibu kota, sudah selayaknya terus berbenah diri dari seluruh aspek pembangunan sehingga cita-cita yang dituangkan dalam visi tersebut dapat diwujudkan. Potensi yang dimiliki Jawa Barat berupa Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang besar dapat digunakan sebagai modal dalam menunjang pembangunan ekonomi. Di samping itu, Jawa Barat mempunyai faktor daya saing komparatif kuat untuk pemenuhan pasar ibu kota Negara.

Pengembangan subsektor peternakan tidak dapat lepas dari tujuan pembangunan Jawa Barat secara umum. Subsektor ini dituntut untuk mampu menggali segenap potensi yang ada di bidang peternakan. Subsektor ini mempunyai potensi dan peluang yang cukup besar, karena antara lain didukung oleh kondisi agroklimat yang cocok untuk berbagai komoditas ternak, SDM peternak, tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang tersebar hampir di setiap Kabupaten/Kota, keberadaan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian dibidang peternakan, organisasi profesi dan perusahaan peternakan serta potensi pasar yang besar termasuk peluang ekspor bagi komoditas peternakan.

Di samping potensi tersebut, kondisi peternakan di Jawa Barat sebagian besar didominasi oleh para peternak kecil, sampai saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar, diantaranya masalah dalam pengendalian penyakit terutama yang bersifat zoonosis, masalah teknis peternakan serta masalah lainnya, meliputi rendahnya kompetensi SDM, penerapan teknologi, terbatasnya sumber permodalan dan investasi, kualitas dan keamanan produk, masih tingginya pemotongan hewan betina produktif tanpa dukungan regulasi pencegahannya yang memadai, tidak efisiennya rantai tataniaga peternakan, serta rendahnya nilai tukar produk yang diterima petani menghambat pembangunan peternakan khususnya di Jawa Barat.

Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas dalam rangka terwujudnya produk peternakan yang berdaya saing sekaligus diperoleh nilai tambah serta dicapainya kecukupan pangan protein hewani bagi masyarakat Jawa Barat, maka masih diperlukan peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi para pelaku usaha peternakan. Sesuai dengan kewenangan dibidang pertanian dalam memfasilitasi keberhasilan pembangunan peternakan di Jawa Barat, maka pelaksanaan kegiatan subsektor peternakan oleh Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat sebagaimana Keputusan Gubernur No. Nomor 42 Tahun 2001 jo. Nomor 5 Tahun 2002.

Sejalan dengan berkembangnya otonomi daerah yang diundangkan dengan nomor 32 Tahun 2004, telah menempatkan kabupaten/kota sebagai pelaksana pembangunan, dan provinsi sebagai pelaksana pembangunan yang bersifat lintas kabupaten/kota atau kegiatan yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota Pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam hal penyusunan, pengawasan, penentuan kriteria, standar dan norma, prosedur dan bimbingan, serta evaluasi pada aspek teknis

fungsional. Dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut, maka setiap daerah provinsi ataupun kabupaten/kota dapat menjalankan subsektor peternakan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

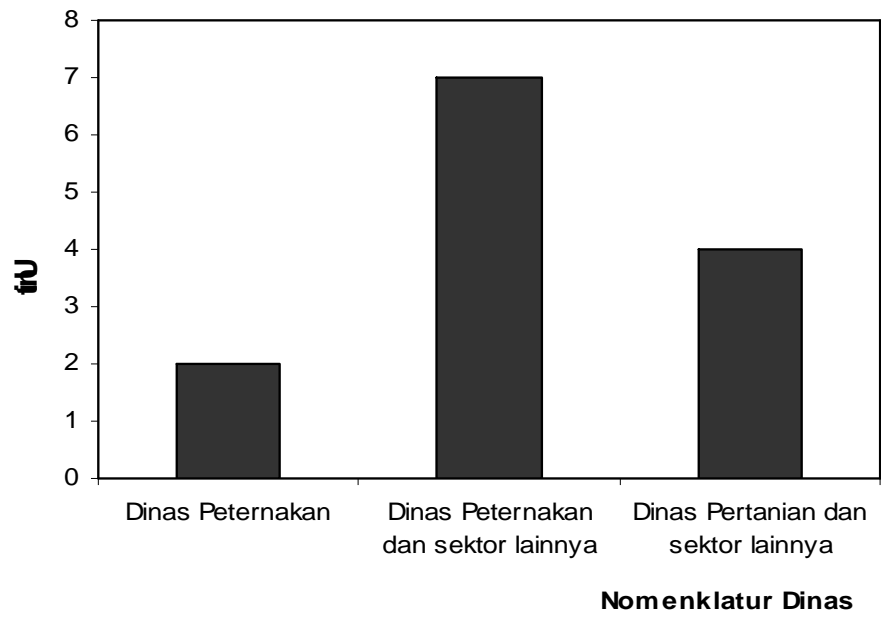
Dengan adanya otonomi daerah, maka kewenangan menjalankan subsektor peternakan dapat dilaksanakan oleh lembaga Dinas atau Subdinas atau Kantor. Penanganan subsektor peternakan oleh lembaga pemerintah di daerah tergantung dari kesepakatan legislatif dan eksekutif di daerah. Bila pihak legislatif menyetujui penanganan subsektor peternakan oleh dinas, maka pihak legislatif menganggap bahwa subsektor peternakan merupakan sektor unggulan di daerah. Namun, penanganan subsektor peternakan dilaksanakan oleh subdinas atau kantor maka pihak legislatif menganggap subsektor peternakan bukan merupakan unggulan daerah.

Kondisi di atas bisa menjadi salah satu faktor penyebab tidak sinkronnya pembangunan peternakan di provinsi dengan kabupaten/kota dalam bidang peternakan. Beragamnya instansi pemerintah yang menangani bidang peternakan dapat menjadi salah satu hambatan bagi pembangunan peternakan secara keseluruhan, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Bagaimana halnya dengan institusi pemerintah di Jawa Barat yang menangani bidang peternakan?

Berdasarkan hasil survei ke 13 Kabupaten/Kota di wilayah timur Jawa Barat menunjukkan bahwa tidak semua instansi pemerintah yang menangani subsektor peternakan berupa Dinas. Hanya ada dua kabupaten yang menangani subsektor peternakan berupa Dinas Peternakan, yaitu Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Peternakan di kedua kabupaten tersebut menyatakan bahwa keberhasilan mereka mengangkat subsektor peternakan berupa dinas adalah:

1. Potensi subsektor peternakan di kedua kabupaten tersebut termasuk sektor unggulan
2. Subsektor peternakan memberikan kontribusi yang besar terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) di kedua kabupaten tersebut
3. Menyakinkan pihak legislatif daerah bahwa sektor peternakan merupakan sektor unggulan dan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD dan masyarakat

Adapun yang bernomenklature dinas peternakan dan lainnya serta non dinas peternakan masing-masing berjumlah 7 dan 4 unit dinas (Gambar 4.1). Hal ini menunjukkan bahwa penanganan sektor peternakan di 11 kabupaten/kota hanya ditangani setingkat kepala subdinas atau kepala seksie. Artinya adalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peternakan harus melalui beberapa tahap keputusan. Berbeda dengan instansi tersebut bernama Dinas Peternakan, maka keputusan langsung ditangani oleh kepala dinas tidak harus melalui tahapan keputusan. Di samping kondisi tersebut, dapat ditunjukkan pula bahwa otonomi daerah memberikan otoritas pada daerah untuk menentukan pembangunannya termasuk penanganan sektor peternakan.



Gambar 4.1. Nomenklature Dinas Peternakan dan Non Dinas Peternakan

BAB 5

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis terhadap instansi yang bergerak dalam sektor peternakan dapat disimpulkan dan direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan nomenklature dinas/subdinas/seksi/kantor peternakan di setiap kabupaten/kota sangat mempersulit koordinasi pembangunan peternakan antara di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
2. Istilah nomenklatur ini sangat terkait dengan kondisi politis, yaitu apabila pihak eksekutif (pemerintah di kabupaten/kota) dapat memberikan argumen yang kuat untuk menetapkan sektor peternakan menjadi dinas kepada pihak legislatif (DPRD Kabupaten/Kota) maka Dinas Peternakan bisa terwujud, namun apabila tidak maka sektor peternakan akan disatukan dengan dinas yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Agribisnis Departemen Pertanian,. 1998. Kemitraan : Kebijaksanaan dan Penjelasan Pola Kemitraan Usaha Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2002. Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun Anggaran 2003. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2002. Pedoman Umum Penyusunan Kegiatan Proyek Pembangunan Pertanian Tahun 2002. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Dinas Peternakan. 2003. Petunjuk Teknis Bagian Proyek Pengembangan Sarana dan Prasarana Agribisnis Peternakan Jawa Barat T.A 2003. Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Bandung
- Dinas Peternakan. 2003. Kebijakan Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Jawa Barat. Dinas Peternakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Bandung
- Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat. 1998. Materi Pembinaan Kemitraan Usaha Pengolahan hasil Peternakan. Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat.
- Gittinger, P. 1982. Analisis Ekonomi Proyek-proyek Pertanian. Edisi Kedua. Penerbit UI Press. Jakarta.
- Haeruman, H.J.S. 1997. Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Masyarakat Desa: Kearifan Integrasi Perekonomian Kota-Desa. Seminar Nasional Pengembangan Perekonomian Perdesaan Indonesia. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Kadariah, Lien Karlina, dan Clive Gray. 1978. Pengantar Evaluasi Proyek. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Edisi Ketiga. LP3ES. Jakarta
- Soetrisno L. 1995. Memberdayakan Masyarakat dalam Pembangunan Indonesia. Makalah Seminar Internasional Strategi Pembangunan Ekonomi dan Bisnis di Indonesia: Refleksi dan Aktualisasi 40 Tahun Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Sri Rahayu, Sondi Kuswaryan, dan Achmad Firman. 2003. Kelayakan Ekonomi Pengembangan Peternakan Rakyat Sapi Potong dalam Upaya Penghematan Devisa Impor. Lembaga Penelitian, Universitas Padjadjaran. Bandung
- Sulistyo dan Sri R. 1994. Potensi dan Prospek Pengembangan Keswadayaan Masyarakat Desa Jatisari, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dalam Mubyarto "Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal". Aditya Media. Yogyakarta.
- Suryadi, D. 1993. Potensi Ekonomi Ternak Ayam Petelur Jantan Sebagai Alternatif Sumber Usahaternak Penghasil Daging. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Bandung.